

***OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) EFFORTS TO IMPROVE THE
QUALITY OF COMMUNITY SERVICES IN PEJAMBON VILLAGE***

***OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS
LAYANAN MASYARAKAT DESA PEJAMBON***

¹**Zainul Arifin**

zainularifin@stie-mce.ac.id

²**Priyo Sigit Akbar Pambudi**

sriwahyunipurborini99@gmail.com

^{1,2}**Jurusan Manajemen, STIE Malangkucecwara Malang**

Abstract

Pejambon Village is one of the villages with an area of 189,190 hectares with a population of around 2126 people. Since the end of 2016, this village has implemented the Open Government Partnership (OGP). The purpose of this study is to describe and analyze community participation in the implementation of the open government partnership of the Pejambon Village Government and its influence on the improvement of welfare and the quality of services they receive. The research method used is qualitative descriptive. The result is the Open Government Partnership which is implemented in Pejambon village by involving stakeholder participation in the process starting from development planning, implementation, evaluation to the utilization of development results, although not perfect, but has been able to answer problems related to transparency, ease of access to public service information, and government policies which are currently considered to be lacking, and have even become one of the solutions to improve welfare community towards village development. This happens because in its implementation, the Open Government Partnership in Pejambon Village is carried out by providing the widest possible opportunities and opportunities for all stakeholders, ranging from the community, PPID, Bojonegoro Institute and the Communication and Informatics Office to direct their resources and potentials starting from the planning, decision-making and evaluation processes of development activities carried out.

Keyword: *Open Government Partnership, Participation, Welfare*

Abstrak

Desa Pejambon merupakan salah satu desa dengan luas wilayah 189.190 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2126 jiwa. Sejak tahun 2016 akhir, Desa ini telah menerapkan *Open Government Partnership* (OGP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat atas pelaksanaan *open government partnership* Pemerintahan Desa Pejambon dan pengaruhnya terhadap meningkatnya kesejahteraan dan kualitas layanan yang mereka terima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasilnya adalah *Open Government Partnership* yang diterapkan di desa Pejambon dengan melibatkan partisipasi stakeholder dalam proses mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan, meski belum sempurna, namun telah mampu menjawab permasalahan terkait transparansi, kemudahan akses informasi layanan publik, dan kebijakan pemerintah yang saat ini dianggap masih kurang, bahkan telah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal ini terjadi karena dalam penerapannya, *Open Government Partnership* di Desa Pejambon dilakukan dengan cara memberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya semua *stakeholder*, mulai dari masyarakat, PPID, *Bojonegoro Institute* maupun Dinas Kominfo untuk mengarahkan sumber daya dan potensi mereka mulai dari proses perencanaan, pembuatan keputusan maupun evaluasi atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Open Government Partnership, Partisipasi, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Open government yang awalnya digagas oleh President Amerika Barack Obama pada tahun 2008 (Wirtz and Birkmeyer 2015) yang berupaya mewujudkan pemerintahan transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan pemanfaatan teknologi untuk menjadikan pemerintah yang lebih efektif dan

akuntabel memasuki September 2011 secara resmi telah menjadi gerakan penting bagi pemerintahan seluruh dunia (Cahya, Tarigan, & Rivaldo, 2021). Karena merupakan sebuah gerakan global yang bertujuan menyediakan kerangka bagi pemangku kepentingan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga (Huda 2019). Konsep ini dianggap revolusioner karena menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang (Holzhacker et al. 2015), yaitu pemerintahan terbuka yang didasarkan pada transparansi, partisipasi public dan inovasi serta tatakelola public yang sinergis dengan masyarakat sipil dan organisasi public lainnya (Huda 2019).

Open government mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan belanja anggarannya pada masyarakat melalui website ataupun media cetak lainnya. Selain itu pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat melalui transparansi yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. (Wirtz and Birkmeyer 2015) Saat inisiasi awal jumlah negara yang tergabung hanya 7 negara (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Brazil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia) namun memasuki tahun 2020 anggotanya sudah mencapai 78 negara (Selfia, Afifuddin, and Sekarsari 2020). Berdasar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan zona integritas instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota didapatkan nilai yang lebih banyak pada kategori CC (168), C (231), D (67) dari 416 Kabupaten, 98 Kota se-Indonesia (Purwanto, 2022), hal ini menunjukkan masih belum maksimalnya pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik terutama pada Tingkat pemerintahan daerah. Sehingga dibutuhkan terobosan yang koheren antara perencanaan dan realisasinya.

Studi literatur tentang tata kelola pemerintah sudah banyak dilakukan. Diantaranya, studi tentang *good governance*, (Okagbue 2011) meneliti tata kelola pemerintahan Nigeria menemukan bahwa gaya kepemimpinan etis bisa menghasilkan perubahan sosial positif dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan potensi untuk memanfaatkan sumber daya guna mengembangkan situasi sosial ekonomi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (Firdaus 2016) meneliti mengenai *sound governance* yang mengeksplorasi dan menganalisis praktik tata kelola *sound governance* dalam program pengembangan kawasan Metropolitan Mamminasata dengan fokus pada lima dimensi, yaitu proses, struktur, nilai, manajemen, dan kebijakan yang bertumpu pada pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk mewujudkan interkoneksi pembangunan lintas kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun (Gulbrandsen 2014) menemukan, bahwa konsep *dynamic governance* akan lebih bermanfaat bila ditunjang inovasi kebijakan pemerintah. (Rajan 2017) meneliti mengenai tatakelola pemerintahan India menemukan bahwa studi tentang tata kelola organisasi yang dinamis lebih banyak ditujukan kepada perubahan sistem intitusional lembaga pemerintah dengan gerakan reformasi birokrasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan devolusi (desentralisasi) strategis pemerintahan. (Yang, Lo, and Shiang 2015) meneliti tentang konsep tata kelola pemerintah *Open Government* di Taiwan melalui empat perspektif yaitu legislasi kebijakan, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan Legislasi kebijakan diketahui berdampak paling signifikan namun bersifat menghambat. Faktor teknologi menghambat namun relatif lebih mudah diselesaikan dengan dukungan yang memadai. Faktor-faktor yang berada dalam perspektif organisasi dan lingkungan mengikuti dampak secara sekunder. (De Blasio and Selva 2016) melakukan studi komparatif antara negara Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris mengungkap, kebijakan *open government* (transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan juga digital teknologi) telah menyebar di seluruh Eropa sebagai model pemerintahan yang baru, namun diterapkan dengan cara yang berbeda untuk berbagai negara,

bahkan menunjukkan adanya persaingan. (De Blasio and Selva 2016) mengungkap, Model *open government* yang diterapkan dengan penekanan pada inovasi dan keterbukaan dalam arti transparansi yang disempurnakan, dengan kolaborasi antara publik dan swasta gagal mencapai keterbukaan dalam pengambilan keputusan meski telah dipaksa oleh dorongan menuju inovasi dalam proses pembuatan kebijakan yang terkonsolidasi secara mekanisme.

Intisari dari beberapa studi di atas menggambarkan untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 1. Faktor pemimpin yang menjadi bagian penggerak perubahan; 2. Organisasi pemerintah yang menjadi katalisator perubahan; 3. revisi Kebijakan pemerintah yang menghambat perubahan agar lebih berpihak kepada perubahan. Konsekuensi dari beberapa argumentasi di atas memunculkan pemahaman bahwa konsep apapun yang ditawarkan, baik secara parsial maupun simultan dimaksudkan untuk menuju sebuah perubahan dalam tata kelola pemerintah yang lebih baik. Untuk kasus di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap sebagai salah satu contoh instansi pemerintahan yang terdepan dalam mengimplementasikan prinsip *Open Government*. Dikatakan demikian karena secara transformatif, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu menerapkan nilai-nilai transparansi ke dalam proses kerja pemerintah (Andhika 2017).

Sistem *open government* di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan karena dianggap mampu menjawab permasalahan terkait transparansi, kemudahan akses informasi layanan publik, dan kebijakan pemerintah yang saat ini dianggap masih kurang. Oleh karena itu, Kemampuan dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan sistem *open government* ini, menjadikan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu percontohan pemerintah daerah terbuka bersama 14 daerah lainnya di dunia pada tahun 2016 (Huda 2019). Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat atas pelaksanaan *open government partnership* Pemerintahan Desa Pejambon dan pengaruhnya terhadap meningkatnya kesejahteraan dan kualitas layanan.

Open Government Partnership

OGP adalah aktivitas global yang bertujuan menyediakan konsep baru bagi pemangku kepentingan negara anggota untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga (Huda 2019).

Open Government Partnership tidak hanya berfokus pada tata kelola transparansi informasi publik, namun juga pada kolaborasi dan partisipasi pihak pemerintah dengan nonpemerintah melalui proses yang demokratis, akuntabel, dan transparan (Lauranti et al. 2017). *Open Government Partnership* secara resmi diluncurkan oleh 8 negara pendiri diantaranya Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat yang menyetujui Deklarasi Pemerintahan Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara (Selfia, Afifuddin, and Sekarsari 2020).

Partnership adalah suatu kolaborasi yang dilandasi kesadaran untuk saling sepakat dalam memberi dan mendapatkan manfaat dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga memperoleh hasil yang optimal (Huda 2019). **Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan** merupakan wujud nyata kepedulian dan kesadaran masyarakat bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggungjawab mereka untuk peduli dan terlibat sebagai subyek yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya (Selfia, Afifuddin, and Sekarsari 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerapan *Open Government Partnership (OGP)* dalam upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat di Desa Pejambon Bojonegoro, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan dengan cara Interview dengan para informan dan dokumentasi, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, adapun hasil penelitian lebih menekankan pada generalisasi. (Moleong, 2018)

Data yang dihasilkan dari penelitian berupa kata-kata, bukan rangkaian angka, yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan cara meringkas, mengubah dan mengedit. Pendekatan yang digunakan untuk analisis data adalah dengan kualitatif deskriptif, yaitu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan kumpulan data yang telah diperoleh tanpa bermaksud untuk mengeneralisasikan kesimpulan (Moleong, 2018).

HASIL

Open government telah menjadi gerakan penting bagi hampir seluruh pemerintahan dunia. Dari sisi keuntungan *open government* lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses data, aktivitas, perundang undangan dan kebijakan pemerintah, serta dapat digunakan oleh publik untuk berbagai tujuan. Kebanyakan para ahli berargumentasi potensi manfaat *open government* dapat merangsang transparansi, akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Wirtz, Weyerer, and Rösch 2018), dan juga sebagai upaya untuk memerangi tindakan korupsi (Kim, Kim, and Lee 2008)

Desa Pejambon merupakan salah satu desa dengan luas wilayah 189.190 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2126 jiwa. Sejak tahun 2016 akhir, Desa ini telah menerapkan *Open Government Partnership (OGP)*, tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Perjalanan desa ini menjadi desa yang terbuka (OGP) dimulai saat musdes tahun 2010 di mana masyarakat menginginkan dibentuknya suatu forum partisipasi atau urun rembuk antara masyarakat dan perangkat desa yang disambut dengan tangan terbuka oleh pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk forum deliberatif yang juga sering disebut dengan Kolaborasi ABGC (*Academician, Business, Government & Community*) yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dengan masyarakat, Dinas Kominfo, Bojonegoro Institute (CSO), dan Lembaga PPID Desa yang saling bahu membahu dan bekerja sama mengatasi permasalahan desa, khususnya permasalahan yang menjadi prioritas penanganan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan keputusan yang ada secara bersama-sama dengan teliti, saksama dengan melibatkan semua pihak di mana partisipasi masyarakat yang menyuarakan aspirasi dihargai dengan setara.

Forum deliberatif tersebut berhasil menyusun visi desa, yaitu “Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera” Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi desa, yaitu: 1. Layanan administrasi secara prima pada masyarakat; 2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka; 3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif dengan pertimbangan skala prioritas; 4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani; 5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata; 6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

Adapun wujud hasil implementasi partisipasi masyarakat dalam penerapan *open government* di desa Pejambon yaitu;

Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Sebelum diterapkannya OGP di desa Pejambon setiap program Pembangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya mulai dari perencanaan hingga penetapan selalu dirancang dan ditetapkan sendiri

oleh pemerintah desa tanpa pernah melibatkan *stakeholder*, yang dalam berbagai hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan atau kebutuhan masyarakat banyak. Bahkan program-program pembangunan dari pemkot yang dimaksudkan untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro umumnya dan Desa Pejambon khususnya tidak dikoordinasikan dan tersosialisasi secara baik dengan pihak desa. Akibatnya rencana pembangunan yang dilakukan pihak desa tidak terarah. Hal tersebut tentu merupakan suatu kegagalan dari sistem pemerintahan yang ideal.

Saat mulai diterapkannya OGP, partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai ditumbuhkan dengan dibukanya forum-forum yang memungkinkan *stakeholder* yang terkait (PPID, Bojonegoro Institute, Dinas Kominfo dan Masyarakat) berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal (Selfia, Afifuddin, and Sekarsari 2020)

Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Pejambon diartikan sebagai partisipasi masyarakat desa Pejambon yang didukung oleh Stakeholder yang dilakukan sedemikian rupa, di mana untuk mereka yang kurang mampu secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan tersebut, sedangkan yang mampu, yang dalam banyak hal lebih memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi tidak saja berupa tenaga, tapi juga sumbangsih pemikiran serta hartanya. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa dilakukan secara alami dalam bentuk sumbangan baik materi, tenaga, maupun pemikiran dari seluruh pihak tanpa melihat status derajat atau kastanya.

Sementara itu PPID berpartisipasi dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan serta menyebarluaskan pelaksanaan setiap kegiatan melalui *website/internet* desa yang bisa diakses dengan leluasa oleh masyarakat, adapun Dinas Kominfo berpartisipasi dengan cara memberikan pelatihan operator data desa serta mengimplementasikan pengelolaan data desa, sedangkan Bojonegoro Institute bertugas memberikan masukan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa Pejambon dalam menentukan dan melaksanakan rencana aksi Desa.

Partisipasi *stakeholder* dan masyarakat desa Pejambon ini juga ditunjukkan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan yang diatur sedemikianrupa sehingga semua pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk memelihara atau merawat tiap proyek yang telah terealisasi agar tidak menurun kualitasnya

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan dilakukan, bukan saja agar tujuan pembangunan di desa pejambon ini dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga agar pemerintah desa memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah yang dihadapi serta kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan.

Proses pemantauan dan evaluasi ini mudah dilakukan masyarakat desa Pejambon, karena dengan diterapkannya OGP ini, pemerintah desa selalu menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, baik itu mengenai anggaran kegiatan pembangunan, hasil realisasi dari kegiatan pembangunan, serta besaran gaji kepala desa dan perangkat desa melalui media desa, yaitu: **Pertama:** Media Luar Ruang, yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu baliho, banner, poster, papan informasi yang dipasang disetiap RT, dan selebaran yang dibagikan ke Masyarakat. **Kedua:** Media Teknologi Informasi, yang terdiri dari; a). Website desa <https://pejambon-bjn.desa.id/>. yang memudahkan masyarakat untuk mengakses semua informasi mengenai Desa Pejambon baik tentang pengelolaan anggaran,

pelaksanaan pembangunan, informasi kependudukan, informasi layanan publik, informasi potensi desa serta semua berita Desa Pejambon yang dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional tanpa harus datang ke Kantor Desa; b). SMS Center Desa: SMS Center (082298156979) merupakan bentuk layanan pemerintah Desa kepada masyarakat melalui *handphone* yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dimanapun tempatnya; serta c). Group WhatsApp yang saat ini memiliki lebih dari 300 anggota. **Ketiga:** Media Tatap Muka, yaitu Forum Rembug Desa dan Forum “Jandom Bareng Kepala Desa” yang merupakan *open government platfrom* dimana pemerintah Desa dan masyarakat atau para pihak duduk satu meja untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama yang kemudian dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Pelaksanaan tersebut dikawal bersama-sama mulai dari proses hingga implementasinya.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Bentuk partisipasi yang merupakan wujud nyata yang dirasakan Masyarakat atas keberhasilan penerapan *Open Government partnership (OGP)* di desa Pejambon yang telah menunjukkan hasil yang membanggakan, yang bisa dilihat dari banyaknya capaian yang diraih oleh Desa Pejambon, antara lain munculnya kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa, meningkatnya partisipasi publik, progres pembangunan desa yang semakin cepat, mandiri dan mampu meraih banyak penghargaan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, ini penting karena hasil Pembangunan yang secara nyata dirasakan masyarakat akan merangsang motivasi dan kesukarelaan mereka untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Wujud partisipasi Masyarakat di Desa Pejambon ini bisa dilihat melalui *Intermediate outcome* yaitu hasil sementara atas berlangsungnya proses kolaborasi dan merupakan indikator keberhasilan jangka panjang yang bisa diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, hal ini diperlukan ketika hasil jangka panjang menyebar, tertunda atau sulit diukur.

Adapun *Intermediate outcome* Desa Pejambon ini tercermin dari penerapan *open government* yang semakin memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan *stakeholder*, apalagi dalam proses penerapan kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran, Pemerintah Desa selalu turut melibatkan PPID, masyarakat, Bojonegoro Institute, dan Dinas Kominfo.

Dampak dari *open government* Pemerintah Desa Pejambon telah mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam Pembangunan Desa terutama pada saat musrembang desa dan Jandom bareng.

Terkait kesejahteraan masyarakat, program *open government* di Desa Pejambon ini sudah mampu mendapatkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari terbangunnya infrastruktur pertanian, kesehatan, dan pendidikan, yang semua dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Sehingga menjadikan Desa Pejambon yang dulu merupakan desa tertinggal kini telah menjadi desa yang mandiri.

Data dari Indeks Desa Membangun yang didasarkan Undang-Undang Desa yang didukung dana desa dan pendamping desa menunjukkan perkembangan kemandirian Desa di Kabupaten Bojonegoro <https://pejambon-bjn.desa.id/>. Capaian-capaian ini didasari kuat oleh semangat masyarakat yang menginginkan pemerintahan terbuka. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran Kepala Desa, Para Pendamping, dan stakeholder lain yang terlibat didalamnya.

KESIMPULAN

Open Government Partnership yang diterapkan di Bojonegoro dengan melibatkan partisipasi stakeholder dalam proses mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan, khususnya yang diterapkan di desa Pejambon meski belum sempurna, tapi telah mampu menjawab permasalahan terkait transparansi, kemudahan akses informasi layanan publik, dan kebijakan pemerintah yang saat ini dianggap masih kurang, bahkan telah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal ini terjadi karena dalam penerapan *Open Government Partnership* di Bojonegoro, khususnya desa Pejambon diterapkan dengan cara memberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya semua *stakeholder*, mulai dari masyarakat, PPID, *Bojonegoro Institute* maupun Dinas Kominfo untuk mengarahkan sumber daya dan potensi mereka mulai dari proses perencanaan, pembuatan keputusan maupun evaluasi atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari semakin baik dan tertatanya pembangunan infrastruktur yang ada di desa tersebut, baik itu fasilitas dan penerangan jalan, pertanian, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi desa. Apalagi semua itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, sehingga Desa Pejambon yang dulu menjadi desa tertinggal kini telah menjadi desa yang mandiri

Kontribusi Penelitian

Meningkatkan kesadaran pemerintah khususnya desa-desa lain yang ada di Indonesia bahwa *Open Government Partnership* yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel bisa dijadikan solusi dalam pelaksanaan proses pembangunan Infrastruktur desa, karena mudah diwujudkan, apalagi bila penerapannya benar-benar mau melibatkan semua *stakeholder*.

Keterbatasan Penelitian

Focus penelitian hanya isu pada Tingkat partisipasi Masyarakat atas penerapan *Open government partnership* dan dampaknya pada meningkatnya kesejahteraan mereka di desa pejambon dan tidak untuk daerah atau desa lain di Bojonegoro.

Rekomendasi

Agar semangat dan antusiasme Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan tetap terjaga, diharap Pemerintah Desa Pejambon untuk consisten, dan bahkan lebih aktif mengupdate setiap informasi terkait aktivitas yang dilakukan pada website desa, baik itu melalui WA Groub, facebook, twitter, maupun youtube.

Daftar Pustaka

Blasio, E. D., & Selva, D. (2016). Why choose open government? motivations for the adoption of open government policies in four european countries. *Policy & Internet*, 8(3), 224-247. doi:10.1002/poi3.118

Cahya, D. A. D., Tarigan, J. S. R., Rivaldo,T., (2021) Urgensi Open Government Melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia, *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 34-57

Firdaus. (2016). Sound governance in case of mamminasata metropolitan development area in South Sulawesi Province. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 20(1), 1-22

Gulbrandsen, L. H. (2014). Dynamic governance interactions: Evolutionary effects of state responses to non-state certification programs. *Regulation & Governance*, 8(0), 74-92. doi:10.1111/rego.12005

Holzhacker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2016). Decentralization and governance in Indonesia. Switzerland: Springer International Publishing, University of Groningen

Huda, M. M. (2018). implementasi Open Goverment Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(9) , 7- 14.

Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti corruption: *The Case of Open Government Information Quarterly*, doi:10.1016/j.giq.2008.09.002

Lauranti, Maria., Afrina, Eka., Mawesti, Dia., et.al., (2017). *Open Government: Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Okagbue, B. O., (2012). *Ethical leadership and good governance in nigerian local governments. Dissertation Submitted of Degree of Doctor of Philosophy*, Walden University, Minnesota USA.

Purwanto, E. A. (2022), Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Zona Integritas (ZI)*, PANRB, Jakarta

Rajan, A. (2017). Institutional dynamics of governance reform in india (1991–2016). *Indian Journal of Public Administration*, 63(1), 41-62. doi:10.1177/0019556116689765

Selfia, . S. M., Afifuddin, M., Sekarsari, R. W., (2020). Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP). *Jurnal Respon Publik*, 14 (5), 6-7.

Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open government: Origin, development, and conceptual perspective. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-16. doi:10.1080/01900692.2014.942735

Wirtz, B. W., Weyrer, J. C., & Rosch, M. (2017). Citizen and open government: An empirical analysis of antecedents of open government data. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-14. doi:10.1080/01900692.2016.1263659

Yang, T.-M., Lo, J., & Shiang, J. (2015). To open or not to open? Determinants of open government data. *Journal of Information Science*, 00(0), 1-17. doi:10.1177/0165551515586715